Manado Post (Hal.8/HDL)

Sabtu, 13 April 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Hukum dan Humas

Nelayan Keluhkan Kekurangan Pasokan

BPK RI Tinjau Distribusi BBM Subsidi

Editor/Peliput: **Peggy Sampouw**

BITUNG—Kedatangan Anggota IV BPK RI Dr Ali Masyikur Musa MSi MHum dan Anggota Komite BPH Migas Fahmi Harsandono ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) Perikani Aertembaga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para nelayan yang kebetulan berada di tempat itu, Jumat (12/4) kemarin. "Dalam satu bulan kami dua kali melaut karena stok cuma sampai pertengahan bulan. Jadi kami sangat kesulitan melaut kembali. Karena itu Depot Bitung sebaiknya menambah kuota BBM subsidi untuk nelayan," ujar Arianto, salah satu nelayan.

Kedatangan Ali Masyikur Musa ini memang dilakukan untuk meninjau distribusi BBM bersubsidi kepada para nelayan di Bitung. "Penyelundupan BBM bersubsidi masih cukup marak di Sulut. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir setidaknya terjadi tiga kasus penyelundupan BBM jenis minyak tanah maupun solar yang berhasil digagalkan oleh aparat. Modusnya tidak hanya upaya memasukkan BBM bersubsidi dari luar daerah kepada nelayan Bitung, untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sering pula terjadi penimbunan minyak tanah yang kemudian, dijual kepada kapal asing di perbatasan mengingat besarnya disparitas antara harga dalam negeri dan negara tetangga," ujar Ali kepada wartawan.

Recky Simboh/Radar Manado

GALI INFORMASI: Anggota IV BPK RI Dr Ali Masyikur Musa MSi MHum dan Anggota Komite BPH Migas Fahmi Harsandono berdialog dengan nelayan di SPBB Perikani Aertembaga, Jumat (12/4) kemarin.

Dan ternyata, jatah BBM bersubsidi untuk nelayan memang tidak mampu mencukupi kebutuhan. Ang-gota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Fahmi Harsandono mengatakan, jatah BBM untuk nelayan hanya 1.000 KL per bulan sementara kebutuhan lapangan mencapai 2.000 KL per bulan. Menurut Fahmi, pihaknya telah berulangkali meminta kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan, namun belum satupun yang merespon. Akibatnya, dalam penetapan jatah BBM bersubsidi untuk nelayan, pihaknya hanya mengacu pada tren tahun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Ali Masyikur Musa mengimbau Pertamina agar dapat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan laut. "Kami memonitoring untuk memastikan pasokan harus dalam posisi yang aman. Kedua,jangan juga terjadi penyalahgunaan dengan ditimbun atau diselundupkan. Kepada BPH Migas saya minta dengan hormat agar ketersediaan harus pada posisi yang aman. Pertamina saya minta dalam pendistribusian mulai dari depot harus lancar, jangan ada penumpukkan. Orang antri itu berarti sesuatu yang tidak pasti. Sulut sebagai provinsi kepulauan butuh transportasi di laut. Saya mencatat Sulut sebagai provinsi yang damai, solid dan stabil. Jangan sampai terjadi konflik karena hal-hal yang tidak stabil," simpulnya.(***)